

**“Peranan Pemerintah Dalam Penanganan Banjir dan Genangan Air di  
Wilayah Sukarame Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar  
Lampung”**

Disusun untuk memenuhi tugas

Mata Kuliah : Metode Penelitian Administrasi Publik

Dosen Pengampu : Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D



Disusun oleh :

Alvin Hatta Fadillah 2216041154

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2023/2024**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengertian bencana yang diringkas pada Undang- Undang No. 24 tahun 2007 umumnya rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu jalannya kehidupan seluruh masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non alam serta faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, rusaknya lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam konteks kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU24/2007), banjir bisa dikelompokkan sebagai salah satu jenis bencana alam. Banjir terjadi saat kondisi daratan digenangi oleh aliran air dalam volume berlebihan.

Sesuai hasil kajian yang dilakukan Wijaya (2002) diidentifikasi penyebab banjir ada dua yaitu: a) Berdasarkan biofisik mencakup curah hujan tinggi, karakteristik DAS yang responsive terhadap banjir, penyempitan saluran drainase, perubahan penutupan lahan. b) Berdasarkan sosial ekonomi dan budaya: Tidak tegasnya penegakan hukum, perilaku masyarakat yang kurang sadar akan lingkungan dan timpangnya pembangunan.

Yulielawati (2008), mengatakan (3) tiga faktor penyebab banjir yaitu:

#### 1. Pengaruh aktivitas manusia yaitu

- a. Pemanfaatan daratan banjir yang digunakan untuk pemukiman industri.
- b. Penggundulan hutan dan yang kemudian mengurangi resapan pada tanah dan meningkatkan larian tanah permukaan, sehingga terjadi erosi yang mengakibatkan sedimentasi diterusan sungai yang kemudian mengganggu jalannya air.
- c. Pemukiman dan pembangunan di daerah daratan banjir dan pembuatan saluran air yang tidak direncanakan dengan baik yang mengakibatkan tidak lancarnya aliran sungai dan menimbulkan banjir.
- d. Membuang sampah sembarangan dapat menyumbat saluran air terutama di perumahan.s

## 2. Peristiwa alam yang bersifat dinamis

- a. Curah hujan yang tinggi
- b. Terjadinya pembendungan atau arus balik yang sering terjadi di muara sungai atau pertemuan sungai besar.
- c. Penurunan muka tanah atau amblesan yang dikarenakan pengambilan air tanah yang berlebihan sehingga menimbulkan muka tanah menjadi lebih rendah.
- d. Pendangkalan dasar sungai karena sedimentasi yang cukup tinggi. (Silalahi & Harahap, 2021)

## Penyebab yang Sifatnya Akibat Ulah Manusia

Ada beberapa kegiatan manusia yang menimbulkan dampak-dampak negatif pada lingkungan sekitarnya, di antaranya:

### Budaya Masyarakat

Ada kelompok masyarakat yang memiliki kebiasaan tidak mendukung kebersihan. Misalnya saja kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga pada saat hujan turun sampah-sampah tersebut menyumbat saluran-saluran drainase yang ada dan menimbulkan banjir pada rumah tinggal di bantaran sungai, dan lain-lain.

### Pembuatan Gorong-Gorong yang Kekecilan

Pada sistem drainase perkotaan ada 2 (dua) jenis gorong-gorong, yaitu:

#### 1. Gorong-gorong jalan

Gorong gorong ini dibangun oleh pemerintah daerah Gorong gorong ini diperlukan pada saat saluran drainase hendak melintas jalan kota, terutama pada perempatan jalan raya. Jumlahnya relatif tidak banyak.

#### 2. Gorong gorong rumah

Gorong-gorong rumah dibangun di depan setiap rumah penduduk. Jumlahnya

bisa ratusan ribu, sesuai dengan jumlah penduduk di kota tersebut. Gorong gorong ini dibangun oleh penduduk kota sehingga banyak yang dibangun ala kadarnya. Banyak gorong-gorong yang

Sedangkan menurut Kodoatie dan Sugiyanto (2002), faktor penyebab terjadinya banjir dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu banjir alami dan banjir oleh tindakan manusia. Banjir akibat alami dipengaruhi oleh curah hujan, fisiografi, erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, kapasitas drainase dan pengaruh air pasang. Sedangkan banjir akibat aktivitas manusia disebabkan karena ulah manusia yang menyebabkan perubahan-perubahan lingkungan seperti: perubahan kon- disi Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan pemukiman di sekitar bantaran, rusaknya drainase lahan, kerusakan bangunan, pengendali banjir, rusaknya hutan (vegetasi alami), dan perencanaan sistim pengendali banjir yang tidak tepat.

Sekarang ini banjir menjadi suatu permasalahan serius di Kota Bandar Lampung salah satunya di wilayah Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame. Karena hampir setiap tahun banjir selalu menimpa setiap wilayah di daerah ini apalagi ketika musim penghujan tiba. Pengaruh perubahan iklim saat hujan juga mempengaruhi peningkatan bencana hidrometeorologi ini. Dengan jumlah frekuensi kejadian yang cukup banyak, bencana ini memberikan dampak terhadap ekonomi maupun lingkungan masyarakat sekitar. Jika kondisi ini tidak cepat ditindaklanjuti, dikhawatirkan banjir yang terjadi akan menjadi lebih besar. Sehingga diharapkan adanya kesadaran masyarakat dan juga penanggulangan dari pemerintah setempat agar bencana tersebut tidak terulang Kembali ataupun menjadi lebih besar.

Intensitas curah hujan yang cukup tinggi merupakan salah satu kunci penyebab terjadinya banjir di kawasan Sukarame dan Way Dadi. Selama musim hujan, sehingga dapat menyebabkan timbulnya genangan air di jalan-jalan dan pemukiman penduduk. Pada lain hal, intensitas hujan yang deras akan menyebabkan air hujan sulit mengalir dengan lancar ke sistem drainase, sehingga air hujan menumpuk dan membanjiri lingkungan sekitarnya. Kurangnya sistem drainase yang baik pula menjadi penyebab terjadinya banjir di kawasan Sukarame dan Way Dadi.

Selain hal tersebut faktor lain yang menjadi permasalahan yaitu, kesadaran yang rendah dalam membuang sampah pada tempatnya juga menjadi penyebab banjir di kawasan tersebut. Sampah yang dibuang secara sembarangan dapat menyumbat saluran pembuangan air, maka berakibat air hujan akan sulit mengalir ke selokan dengan mudah dan lancar. Selain hal itu, sampah yang menyumbat juga bisa menyebabkan terjadinya banjir yang disebabkan oleh air limbah atau banjir rob.

Urbanisasi yang terjadi di perkotaan membawa beberapa perubahan terhadap topografi dan tata kota. Pembangunan bagi perkotaan memperluas area kedap air (impermeable) dengan pembangunan gedung-gedung, jalanan aspal, parkir, dan lain-lain yang membuat berkurangnya peresapan air hujan ke dalam tanah. Bila pembangunan perkotaan tersebut tidak direncanakan secara hati-hati, akan timbul beberapa masalah dalam perkotaan. Salah satunya adalah banjir yang terjadi di beberapa kota besar di Indonesia. (Syarifudin, 2017)

Drainase adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat (Suripin, 2004). Drainase termasuk salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih dan sehat. Prasarana drainase berfungsi sebagai pengendalian kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah genangan air dan banjir. Kegunaan saluran drainase adalah agar tidak ada kumpulan air tanah, menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal, mengendalikan erosi tanah, mengurangi kerusakan jalan dan bangunan di sekitar daerah tersebut.

Masalah-masalah banjir di perkotaan pada umumnya disebabkan oleh kurang efektifnya sistem drainase perkotaan. Pengembangan drainase perkotaan kadang-kadang sulit dilaksanakan dikarenakan keadaan topografi yang datar, pengembangan kota di dataran banjir, tingkat hujan yang tinggi dari daerah kedap air yang luas, dan kerusakan/hilangnya daerah penampungan.

Menurut Michael E. Kraft & Scott R. Furlong

"Public policy is what public officials within government, and by extension the citizens they represent, choose to do not to do about public problems. Public problems

refer to conditions the public widely perceives to be unacceptable and that therefore require intervention (Kebijakan publik adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pejabat publik dalam pemerintahan atas rakyat yang diwakili. Permasalahan publik merujuk pada setiap hal yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat secara luas dan oleh karena itu memerlukan intervensi dari pemerintah)." (Mustari & IP, 2015)

Hampir semua kota di Indonesia mengalami bencana banjir ketika musim hujan. Peristiwa tersebut setiap tahun berulang kembali, namun permasalahan ini belum terselesaikan, bahkan cenderung meningkat. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan, sedangkan genangan adalah peristiwa ketika kawasan dipenuhi air karena tidak ada drainase yang mematus air tersebut keluar kawasan (Sobirin, 2007). Dalam mengatasi masalah banjir ini diperlukan suatu sistem drainase yang baik, dengan didukung berbagai aspek perencanaan yang terkait di dalamnya. Hal ini terjadi karena pada jalan belum terdapat sistem drainase yang memadai, jika intensitas hujan tinggi kemungkinan terjadi banjir/genangan air cukup besar.

Berdasarkan pencatatan sejarah kejadian bencana pada situs [dibi.bnpb.go.id](http://dibi.bnpb.go.id), bencana banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Kota Bandar Lampung. Sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2019 telah terjadi 14 kali banjir dari 26 total kejadian bencana di Kota Bandar Lampung. Pada umumnya banjir yang terjadi di Kota Bandar Lampung umumnya bersifat genangan dengan tinggi maksimal sekitar dua meter dan tidak separah yang terjadi di kota besar lainnya seperti Jakarta. Meskipun tidak begitu parah, akan tetapi banjir yang terjadi sangat menghambat aktivitas masyarakat, banyak sarana dan prasarana yang tidak dapat digunakan, dapat menimbulkan berbagai penyakit pasca banjir, menimbulkan kerugian harta benda bahkan dapat menelan korban jiwa. Secara tidak langsung, banjir juga dapat menghambat kegiatan perekonomian di suatu wilayah.

Perencanaan Sistem Drainase Setiap perkembangan kota harus diikuti dengan perbaikan sistem drainase. Drainase perkotaan harus terpadu dengan sanitasi sampah, pengendalian banjir kota, dan sebagainya. Tujuan diadakannya drainase adalah suatu usaha pengurangan debit banjir, oleh karena itu perencanaannya difokuskan pada identifikasi, analisis dan rekomendasi perbaikan atau pembuatan saluran drainase didaerah perkotaan. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui secara rinci penyebab banjir

, inventarisasi saluran drainase, pengukuran tinggi genangan banjir, waktu genangan banjir, dan kerugian ekonomi baik material maupun non material yang disebabkan oleh banjir tersebut. Analisis dilakukan untuk mengetahui dan menghitung besarnya kerugian ekonomi yang disebabkan banjir serta hubungannya dengan kapasitas drainase yang ada diperkotaan. Rekomendasi baik rekomendasi untuk perbaikan dan pembuatan jaringan drainase yang baru adalah hasil akhir dari studi yang didasarkan pada kegiatan identifikasi dan dianalisis. (Dirwansyah, 2014)

Peran menurut Soekanto (2009:212) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Sedangkan menurut Merton dalam Raho (2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. (Peran, 2018)

Dinas Pekerjaan Umum memiliki peran dalam pemeliharaan dan pengoperasian peralatan pengendalian banjir berupa pemeliharaan drainase dari sampah, sedimen, pemeliharaan drainase juga dilaksanakan oleh masyarakat maupun relawandan pengoperasian pompa dan pintu air. (Wulandari, 2022)

Melakukan peran berupa sosialisasi kepada masyarakat terkait dilarangnya membuang sampah di saluran air yang dilaksanakan secara rutin di kelurahan dan kecamatan, sehingga pengendalian banjir dapat terlaksana dengan baik dengan tidak adanya sampah di saluran air.

Wilayah Sukarame di Bandar Lampung adalah tempat langganan banjir dan genangan air. Ini bukanlah kejadian pertama, melainkan satu dari sekian banyak peristiwa serupa yang seringkali terjadi di wilayah tersebut. Warga Sukarame yang sudah terbiasa dengan fenomena ini mulai merasa frustrasi dan bertanya-tanya tentang kurangnya perhatian dan peran pemerintah, terutama Dinas Pekerjaan Umum (PU), dalam pencegahan dan penanganan banjir serta genangan air di daerah mereka, khususnya dalam hal sistem drainase.

Sejak beberapa tahun terakhir, warga Sukarame sudah sering mengalami dampak buruk banjir dan genangan air. Pada musim hujan, genangan air seringkali mencapai ketinggian yang mengganggu aktivitas sehari-hari warga. Meskipun mereka telah mengajukan keluhan dan permintaan kepada pemerintah setempat, terutama kepada Dinas PU, upaya untuk memperbaiki situasi ini sepertinya terasa lamban dan kurang efektif.

Salah satu masalah yang paling mencolok adalah sistem drainase yang buruk di wilayah Sukarame. Saluran-saluran air yang ada sudah lama tidak pernah diperbaiki atau ditingkatkan, sehingga tidak mampu menampung volume air hujan yang cukup besar. Air hujan yang seharusnya dialirkan dengan baik ke sungai terdekat justru seringkali menggenangi jalan raya dan perumahan warga. Hal ini mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur dan mengganggu mobilitas masyarakat.

Kurangnya perhatian pemerintah, terutama Dinas PU, dalam memperbaiki sistem drainase dan mencegah banjir juga tercermin dalam kurangnya pemeliharaan dan pembersihan sungai-sungai yang ada di wilayah Sukarame. Sampah dan tumpukan lumpur seringkali menyumbat aliran sungai, menyebabkan sungai meluap saat hujan deras dan membanjiri pemukiman warga.

Selain itu, pembangunan di wilayah Sukarame juga perlu diawasi dengan lebih baik. Sebagian besar pembangunan yang terjadi seringkali tidak memperhatikan aspek tata ruang dan drainase yang memadai. Tanah-tanah yang seharusnya berfungsi sebagai resapan air hujan telah digunakan untuk pembangunan, menyebabkan peningkatan risiko banjir.

Masyarakat Sukarame berharap agar pemerintah, terutama Dinas PU, lebih memperhatikan permasalahan ini. Mereka membutuhkan investasi dalam perbaikan sistem drainase yang sudah usang, pembersihan sungai secara berkala, dan penegakan aturan tata ruang yang lebih ketat. Dengan tindakan yang lebih proaktif dari pemerintah, warga Sukarame berharap dapat mengurangi risiko banjir dan genangan air yang sering mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, serta menjaga wilayah mereka agar lebih aman dan nyaman untuk ditinggali.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah rumusan masalah untuk penelitian dengan judul "Peranan Pemerintah Dalam Penanganan Banjir dan Genangan Air di Wilayah Sukarame: Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung":

1. Bagaimana kondisi banjir dan genangan air di wilayah Sukarame, Kota Bandar Lampung, selama beberapa tahun terakhir?
2. Apa peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung dalam penanganan banjir dan genangan air di wilayah Sukarame?
3. Apa hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas PU Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan perannya dalam penanganan banjir dan genangan air di Sukarame?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian "Peranan Pemerintah Dalam Penanganan Banjir dan Genangan Air di Wilayah Sukarame: Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung" adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kondisi aktual banjir dan genangan air yang terjadi secara berkala di wilayah Sukarame, Kota Bandar Lampung, selama beberapa tahun terakhir.
2. Untuk mengetahui peran yang telah dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung dalam penanganan dan mitigasi banjir serta genangan air di Sukarame.
3. Untuk mengevaluasi efektivitas tindakan yang telah diambil oleh Dinas PU Kota Bandar Lampung dalam mengatasi masalah banjir dan genangan air di Sukarame.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung: Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi banjir dan genangan air di Sukarame dan evaluasi terhadap peran Dinas PU. Hal ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan, alokasi anggaran yang lebih efektif, dan langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah banjir.

2. Manfaat bagi Masyarakat Sukarame: Hasil penelitian akan membantu masyarakat Sukarame untuk mengerti lebih lanjut tentang upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam penanganan banjir dan genangan air, serta memberikan wawasan tentang harapan mereka yang dapat diperhatikan oleh pemerintah.

3. Manfaat bagi Penelitian Selanjutnya: Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang mitigasi bencana banjir dan genangan air, baik di Sukarame maupun di wilayah lain dengan masalah serupa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu dilakukan menggunakan cara mengutip sebagian hasil karya penelitian yang sudah dilakukan dan relevan dengan judul serta masalah yang di angkat untuk dapat menjadikan perbandingan dan menghindari anggapan kesamaan. Penelitian terdahulu yang relevan ini menjadi referensi dalam meneliti.

1. Jurnal karya Redy Irawan dengan judul “PROGRAM DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI DAERAH ANTASARI DI KOTA SAMARINDA” Vol 4, No.1 2016. Yang membahas tentang program dinas pekerjaan umum dalam penanggulangan banjir didaerah Antasari Kota Samarinda serta untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi dalam program dinas pekerjaan umum dalam penanggulangan banjir di daerah Antasari di Kota Samarinda. Pada hasil Hasil penelitian tentang program dinas pekerjaan umum dalam penanggulangan banjir di daerah antasari di kota samarinda. Telah berjalan dan terlaksana. Namun, masih ada juga faktor yang menghambat di dalam dinas pekerjaan umum dalam penanggulangan banjir didaerah Antasari di Kota Samarinda seperti keterbatasan pendanaan yang masih kurang, masih kurangnya tempat yang di jadikan pembebasan lahan pelebaran parit di Antasari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan bersifat deskriptif. Pengumpulan data penelitian hampir sama dengan teknik pengumpulan data peneliti yaitu menggunakan teknik dokumentasi, observasi, serta wawancara. Metode analisis data meliputi, Kondensasi Data, Penyajian Data, Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi.
2. Skripsi karya Ahmad Ridho Gifari dengan judul “PENGELOLAAN DRAINASE OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG SUMBER DAYA AIR DALAM MENANGANI BANJIR DI KOTA PEKABARU” 2017. Yang membahas tentang Penanganan masalah sistem drainase dan pengelolaan sistem drainase yang baik. Pada hasil penelitian menjelaskan bahwa masih adanya sistem drainase yang berfungsi secara

menyeluruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data penelitian hampir sama dengan teknik pengumpulan data peneliti yaitu menggunakan teknik dokumentasi, observasi, serta wawancara, angket. Metode analisis data meliputi, analisis statistik deskriptif kemudian di kelompokkan menjadi tabel-tabel. Perbedaan jurnal ini dengan peneliti yaitu terletak pada jenis penelitian namun pada dasarnya sama-sama memiliki fokus terhadap aspek yang dapat mengatasi banjir.

3. Jurnal karya Novia dan Mustiqowati dengan judul “Strategi Penanggulangan Banjir Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Di Kota Pekanbaru: Dalam Tinjauan Analisis SWOT” Vol 5, No.2 2023. Yang membahas analisis strategi penanggulangan banjir oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) di kota Pekanbaru. Pada hasil penelitian ini menggambarkan bahwa strategi penanggulangan banjir oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang di kota Pekanbaru berada pada penerapan strategi yang lemah namun sangat berpeluang. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data penelitian yaitu menggunakan teknik analisa. Metode analisis data SWOT. Perbedaan penelitian ini terletak pada analisis SWOT yang mendalam terhadap masalah.

## B. Implementasi Kebijakan Publik

### 1. Implementasi Kebijakan

Apa Implementasi Kebijakan itu? Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindle (1980: 7) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk., (1994: 15) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Grindle memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

#### a. Model Implementasi Kebijakan

1) Model Pendekatan Top-Down Menurut pandangan George C, Edwards III (1980) dalam Subarsono (2008), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a) Komunikasi. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu di komunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Komunikasi menurut Edward III, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dan pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik.

b) Sumberdaya. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.

c) Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Disposisi atau "sikap dari pelaksana kebijakan" adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktik tidak terjadi bias.

d) Struktur Birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya

menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan.

2) Model Pendekatan Bottom-Up Model bottom up adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan consensus. Persons (2006), mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Pendekatan bottom up menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan.

3) Model Pendekatan Sintesis (Hybrid Theory) Sebatier (1986) mengkaji bahwa implementasi dan policymaking menjadi kesatuan proses yang sama. Asumsi yang dibangun adalah selain tanggung jawab pemerintah mengkombinasikan antara Top Down dan Bottom Up, pelaksanaan kebijakan publik harus ada jaminan dukungan dari masyarakat. Karena itu dari sudut pandang ini, implementasi dan policy-making menjadi kesatuan proses yang sama.

## 2. Kebijakan Publik

### a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever governments choose to do or not to do). Pengertian ini mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta, (2) kebijakan publik menyangku pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh instansi pemerintah.

Definisi lain mengenai kebijakan publik pun ditawarkan oleh Carl Fredrich yang mengatakan bahwa kebijakan adalah, “serangkaian tindakan/kegiatan yang usulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinankemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.”

### b. Formulasi Kebijakan Publik

Formulasi kebijakan disebut juga dengan istilah kebijakan perumusan kebijakan. Menurut Sidney, formulasi kebijakan merupakan bagian dari tahap awal pembuatan keputusan kebijakan. Ini artinya, formulasi kebijakan menjadi langkah awal penting karena memberikan informasi pada para analisis kebijakan dan decision makers mengenai: apa rencana yang akan dibuat untuk mengatasi suatu fenomena atau masalah publik? Apa tujuan dan prioritas yang hendak dituju dari formulasi kebijakan? Dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, yang harus dipahami adalah perumusan kebijakan merupakan turunan dari perumusan masalah yang telah diagendakan dalam agenda kebijakan.

Menurut Frank T. Paine dan William Naumes bahwa pembuatan kebijakan publik (policy formulation) melibatkan keseluruhan sistem dengan berbagai kondisi dan alternatif serta melibatkan proses-proses sosial dan proses-proses intelektual” (Budi Winarno, 2002;68). Kemudian menurut James E. Anderson (1979;52) pembuatan kebijakan merupakan keseluruhan tahap dalam kebijakan publik yang berupa rangkaian keputusan. Sedangkan proses perumusan kebijakan publik menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Ia merupakan proses yang secara spesifik ditujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khusus. Riant Nugroho (2003:101) menjelaskan perumusan kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik kar

c. Faktor penentu dilaksanakan atau tidaknya suatu Kebijakan Publik

1) Faktor penentu pemenuhan kebijakan

- Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah
- Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
- Adanya sanksi hukum
- Adanya kepentingan publik
- Adanya kepentingan pribadi
- Masalah waktu

2) Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan

- Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada
- Tidak adanya kepastian hukum

- Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi
- Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum

Teori sistem berpendapat bahwa pembuatan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan. Tuntutan terhadap kebijakan dapat lahir karena pengaruh lingkungan, dan kemudian ditransformasikan ke dalam suatu sistem politik. Dalam waktu yang bersamaan ada keterbatasan dan konstrain dari lingkungan yang akan mempengaruhi policy markers. Faktor lingkungan tersebut antara lain karakteristik geografi, seperti sumber daya alam, iklim, dan topografi; variabel demografi, seperti banyaknya penduduk, distribusi umur penduduk, lokasi sosial, kebudayaan, politik, struktur sosial, dan sistem ekonomi.

Linblom dalam bukunya “The Policy Making Process” (Sudarwan Danim, 2000) mengemukakan lima tahap atau mekanisme untuk mempelajari perumusan kebijakan publik yaitu :

- 1) Bagaimana masalah-masalah itu timbul dan masuk kedalam agenda acara para pembuat atau perumus kebijakan pemerintah.
- 2) Bagaimana masyarakat merumuskan masalah-masalah tersebut untuk pembuatan suatu kebijakan.
- 3) Sikap apa yang diambil oleh badan legislatif atau lembaga lainnya atas kebijakan itu.
- 4) Bagaimana para pemimpin merapatkan/merespon kebijakan itu.
- 5) Bagaimana kebijakan itu dievaluasi

### **Pengendalian Banjir**

Banjir kota adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan di kota. Pengarahan banjir Uni Eropa mengartikan banjir sebagai perendam sementara oleh air pada daratan yang biasanya tidak terendam air di kota. Banjir kota diakibatkan oleh volume air disuatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap dan menjebol bendungan sehingga air keluar dari batasan alaminya di kota.

Banjir merupakan permasalahan umum terjadi disebagian wilayah indonesia, terutama di daerah penduduk misalnya di kawasan perkotaan. Dampak banjir ini kerugian yang ditimbulkan bisa sangat besar baik dari segi materi maupun kerugian jiwa. Oleh

karena itu di daerah yang padat penduduknya, pekerjaan pengendalian banjir perlu di tingkatkan. Pengendalian banjir secara umum merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan pekerjaan pengendalian banjir, eksploitasi dan pemeliharaan, yang pada dasarnya untuk mengendalikan banjir, pengaturan penggunaan daerah dataran banjir dan mengurangi atau mencegah adanya bahaya/kerugian akibat banjir.

Dengan perkataan lain pengendalian banjir bertujuan untuk memperkecil tingkat resiko bahaya/kerugian akibat banjir yang akan timbul. Atas dasar pertimbangan pengendalian banjir yang baik, maka disamping penyelesaian konstruksi fisiknya perlu adanya monitoring, evaluasi, rencana perbaikan dan pemeliharaan yang kontinyu.

#### 1. Sistem Pengendalian Banjir

Pada suatu daerah perlu dibuat sistem pengendalian yang baik dan efisien, dengan memperhatikan kondisi yang ada dan pengembangan pemanfaatan sumber air mendatang. Pada penyusunan sistem pengendalian banjir perlu adanya evaluasi dan analisis atau memperhatikan hal-hal yang meliputi antara lain:

- Analisis cara pengendalian banjir yang ada pada daerah tersebut/yang sedang berjalan.
- Evaluasi dan analisis tata guna tanah di daerah studi, terutama di daerah bawah/dataran banjir.
- Evaluasi dan analisis daerah pemukiman yang ada maupun perkembangan yang akan datang.
- Memperhatikan potensi dan pengembangan sumber daya air di masa mendatang.
- Memperhatikan pemanfaatan sumber daya air yang ada termasuk bangunan yang ada.

Perencanaan sistem pengendalian dengan memperhatikan hal-hal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi yang ada (existing) mulai dari hulu sampai hilir sungai sehingga semua perencanaan sedapat mungkin dapat terlaksana yang dituangkan pada rencana pengendalian banjir. Rencana pengendalian banjir tersebut dibuat dengan beberapa alternatif dan berbagai kombinasi. Dari beberapa alternatif sistem pengendalian yang ada, dipilih yang paling optimal, dengan pemberian angka nilai atau score untuk berbagai aspek

peninjauan, sehingga salah satu sistem yang mempunyai total nilai yang tertinggi merupakan sistem terpilih.

## 2. Pelaksanaan Pengendalian Banjir

a. Penentuan skala prioritas masing-masing kegiatan dan tahap pelaksanaan pengendalian banjir.

Pada pekerjaan pengendalian banjir jangka panjang mempunyai target waktu penyelesaian. Maka perlu adanya penentuan skala prioritas dan urutan pekerjaan/bangunan yang harus dilaksanakan. Urutan/prioritas tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan maupun kondisi setempat, namun secara umum dapat dijelaskan:

Penanggulangan banjir pada suatu sungai, yang dilakukan pada tingkat awal adalah merupakan pekerjaan darurat, untuk perbaikan tanggul untuk mengatasi banjir tahunan.

Pengendalian banjir tahap berikutnya, berupa pekerjaan yang lebih besar, biasanya berupa perbaikan alur, yang merupakan pengendalian jangka pendek.

Pada tahap berikutnya dilakukan pekerjaan jangka menengah yang merupakan pekerjaan pengendalian banjir seperti pembuatan alur pengendalian banjir, retarding basin, rekonstruksi bangunan pengendali banjir dan termasuk pekerjaan pengaturan sungai.

Pada tahap akhir yang merupakan pengendalian jangka panjang yang dikaitkan dengan pengembangan sumberair, dengan membangun waduk serbaguna, yang diantaranya berfungsi untuk pengendalian banjir.

b. Antisipasi pengendalian banjir pada masa pelaksanaan

Berdasarkan pola pelaksanaan pengendalian banjir yang dilaksanakan secara bertahap, adalah perlu adanya antisipasi pengendalian banjir pada masa pelaksanaan. Hal ini diharapkan dari pelaksanaan bertahap sudah dapat meningkatkan debit banjir yang dapat dikendalikan dan bangunan-bangunan

yang ada sebelum pekerjaan selesai secara keseluruhan tidak mengalami kerusakan.

Pada bangunan-bangunan pengatur banjir perlu adanya aturan operasional sementara sebelum seluruh bangunan pengendalian selesai dibangun, untuk menghindari adanya kegagalan. Pada akhirnya semua bangunan pengendalian banjir akan berfungsi secara optimal setelah seluruh bangunan sesuai sistem dan target waktu penyelesaian.

## Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

##### a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Field research digunakan dengan cara menggali data yang bersumber dari lokasi atau penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian ini adalah sebagai instrument kunci, analisa data bersifat kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari generalisasi.

##### b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan mencatat, menganalisis, menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan menguji hipotesa.

#### 2. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data atau informai yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mengadakan observasi dan wawancara interview di Dinas Pekerjaan Umum.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang atau bahan banding guna memahami data primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, tulisan, makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip atau bahan lain serta informasi dari

pejabat instansi yang berwenang yang berhubungan dan menunjang dalam masalah penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Bandar Lampung, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dan Lokasi penelitian.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.<sup>23</sup> Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada responden, kemudian responden menjawab secara bebas. Tujuannya agar mendapatkan informasi yang valid, menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian. Peneliti di sini mewawancarai Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa peraturan perundang-undangan, catatan, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya. Data ini cenderung kepada data sekunder.<sup>24</sup> Untuk mengamati kejadian yang kompleks dapat menggunakan alat bantu misalnya seperti kamera, video tape, dan audio tape recorder.

#### d. Analisis Data

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menghimpun dan mengelola data yang sudah terkumpul

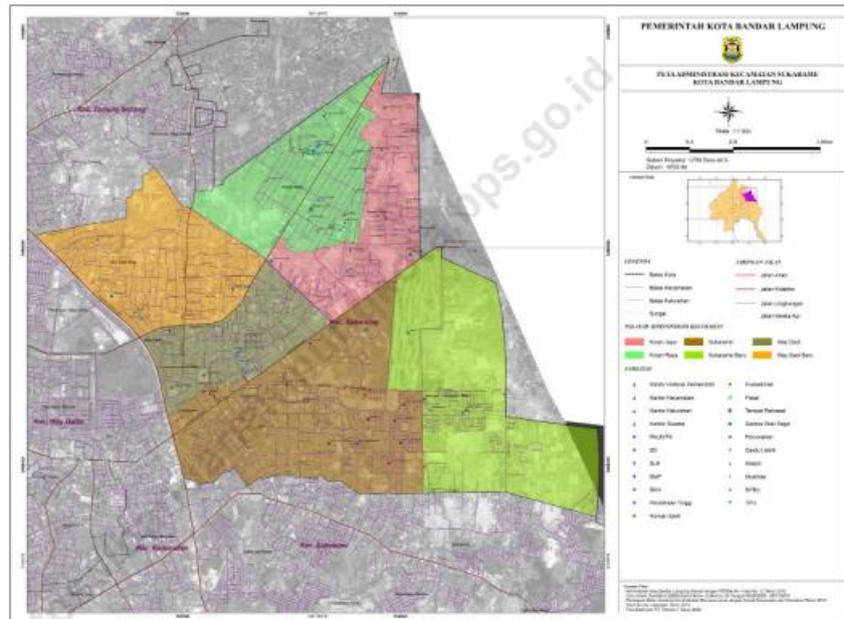
dengan cara mengklarifikasi semua jawaban untuk dianalisa. Data yang diperoleh dilapangan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus.

Data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran singkat lokasi penelitian



Gambar 1.1 Peta Administratif

Sumber : Bps.go.id

Seperti berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, memuat Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, posisi geografis dan wilayah administratif di wilayah kawasan kecamatan batasan-batasan dibawah ini :

- Di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Selatan
- Di sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Sukabumi
- Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan
- Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Way Halim dan Kedamaian.

## ULASAN

Kecamatan Sukarame memiliki luas wilayah sebesar 14,75 Km<sup>2</sup>. Dengan luas wilayah tersebut Kecamatan Sukarame terdiri dari 6 kelurahan yaitu :

1. Sukarame
2. Way Dadi
3. Korpri Jaya
4. Way Dadi Baru
  - a. Korpri Raya
5. Sukarame Baru

<b>Desa/Kelurahan Village/Kelurahan</b>	<b>Luas Total Area (km<sup>2</sup>/sq.km)</b>	<b>Persentase terhadap Luas Kecamatan Percentage to Subdistrict Area</b>
(1)	(2)	(3)
Sukarame	2,35	15,93
Way Dadi	2,57	17,42
Korpri Jaya	1,89	12,81
Way Dadi Baru	2,34	15,86
Korpri Raya	3,02	20,47
Sukarame Baru	2,58	17,49
<b>Sukarame</b>	<b>14,75</b>	<b>100,00</b>

Sumber/Source: Bagian Pemerintahan Kota Bandar Lampung /Government Division of Bandar Lampung Municipality

Gambar 1.2 Wilayah Administratif Kecamatan Sukarame

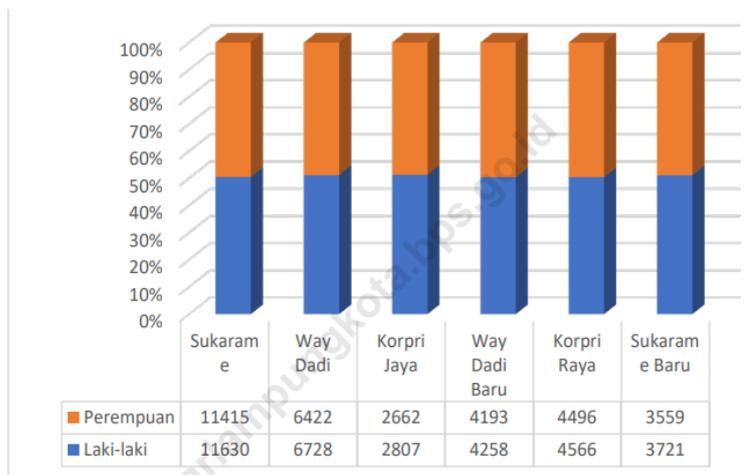
Jumlah Penduduk di Kecamatan Sukarame, 2022

1. Pada Tahun 2022 Semester 1, penduduk Kecamatan Sukarame berjumlah 66.457 jiwa dengan rasio berdasarkan jenis kelamin yaitu 102,94 berdasarkan angka berikut bisa disi

mpulkan bahwa jumlah penduduk yang memiliki jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

2. Daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi atau banyak berada di Kecamatan Sukarame yakni 9.806 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan untuk daerah yang yang memiliki kepadatan penduduk paling kecil yaitu pada Kelurahan Sukarame Baru yakni 2.822 jiwa/km<sup>2</sup>. (2022)

**Jumlah Penduduk di Kecamatan Sukarame, 2022**  
**Number of Population in the Sukarame Subdistrict, 2022**



Catatan/Note : Jumlah Penduduk per 2022 Semester 1/ Population per 2022 Semester 1

Sumber/Source : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung/ Population and Civil Registration Service of Bandar Lampung Municipality

Gambar 1.3

### Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung adalah sebuah instansi pemerintah yang dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi penyelenggara pengadaan proyek-proyek pekerjaan umum. Proyek-proyek tersebut dibagi dalam 3 (tiga) bidang pekerjaan yang meliputi bidang: bina marga, sumber daya air, dan cipta karya.

Selain itu, penanggulangan dan pencegahan, penanganan kawasan, pengelolaan peremajaan/perbaikan kawasan kumuh, kebijakan strategis pemberdayaan dalam

pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan, rumah negara, status bangunan dan gedung yang dilindungi dan dilestarikan, penetapan kriteria pemantauan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dan perbatasan kawasan strategi, penyusunan rencana strategi detail tata ruang, kebijakan strategis dan program pembangunan baru, perbaikan, pemanfaatan, pemugaran, perluasan dan pemeliharaan dalam pembinaan perumahan formal dan swadaya, sistem pembangunan kawasan, keterpaduan prasarana dan keserasian kawasan perumahan serta pembinaan hukum peraturan perundang-undangan dan pertanahan untuk perumahan, teknologi dan industri, pengembangan pelaksanaan pembangunan perumahan peran serta masyarakat dan sosial budaya, kebijakan strategis pembangunan pedesaan dan perkotaan, pengembangan air minum dan sistem penyediaan air minum serta prasarana sarana air limbah, jasa konstruksi bangunan gedung sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta norma, standar, pembinaan dan pemberdayaan manual yang ditetapkan pemerintah dan provinsi dan searah dengan kebijakan umum daerah.

Banjir merupakan suatu masalah yang rentan mengancam di wilayah Kecamatan Sukarame terutama dengan daerah Kelurahan Way Dadi dan Kelurahan Sukarame Baru. Persoalan banjir sudah menjadi tradisi tahunan yang wajib dirasakan apabila musim penghujan tiba. Banjir dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas, merusak badan-badan jalan dan prasarana lainnya akibat sering tergenang air, serta dapat menimbulkan kerugian materil bahkan korban jiwa apabila bencana banjir besar terjadi.

Menurut Suprawoto banjir adalah meluapnya air dari saluran dan menggenangi kawasan sekitarnya. Sekitar 90% dari kejadian bencana alam berhubungan dengan banjir. Ada 2 jenis banjir, yaitu banjir bandang kiriman dan banjir pasang-surut. Jika disimpulkan dari hasil temuan narasumber mengatakan bahwa jenis banjir yang kerap melanda di Kawasan Way Dadi, Sukarame ini adalah banjir jenis kiriman yang mana berasal dari daerah Kecamatan Way Halim.

### **Penyebab Yang Biasanya Terjadi**

Isu strategis dan permasalahan mendesak Seiring dengan perkembangan kota yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan secara langsung, serta bertambahnya jumlah penduduk, masalah banjir dan genangan merupakan konsekuensi yang harus

dihadapi Kota Bandar Lampung. Adapun penyebab genangan yang umumnya terjadi adalah sebagai berikut:

- Terjadi genangan di ruas jalan protokol karena merupakan cekungan terutama di jembatan, di atas sungai yang memotong jalan, Hal ini disebabkan kapasitas jembatan dan saluran yang lebih kecil dari debit banjir yang terjadi
- Terjadinya perubahan tipe saluran akibat pembangunan ruko-ruko yang tumbuh dengan pesat dimana mana, seperti semula tipe saluran terbuka menjadi saluran tertutup dengan beton dan tidak adanya lubang inlet atau manhole untuk masuk ke saluran
- Terjadinya genangan di area permukiman disebabkan kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi, atau disebabkan karena gorong-gorong jalan yang tertutup endapan atau sampah, atau belum adanya saluran drainase
- Dijumpai banyak bangunan di bantaran sungai, sehingga mempersempit luas penampang sungai
- Arah aliran yang tidak teratur dan terjadinya pendangkalan sehingga air tidak mampu mengalir dengan sempurna, sehingga terjadi genangan di beberapa tempat
- Peninggian tanggul kiri dan kanan sungai tidak mengatasi banjir, bahkan menghambat air di kiri dan kanan sungai yang berupa cekungan/lembah, untuk masuk ke sungai, yang mengakibatkan runtuhnya tanggul, terutama di sekitar tikungan saluran drainase.

### **Kebijakan Yang Dapat Diterapkan**

Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mengantisipasi datangnya bahaya bencana, karena pada dasarnya pemerintah memiliki peran untuk melindungi warga dari berbagai bencana yang terjadi. Antisipasi tersebut bukan hanya dalam menyiapkan diri menghadapi bencana, namun juga untuk mengurangi dampak buruk akibat dari bencana yang terjadi. Sehingga untuk mengantisipasi datangnya bencana maka perlu mengidentifikasi dan merencanakan supaya semua pihak mengetahui cara yang harus dilakukan pada saat bencana terjadi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko, dan dampak bencana.

## **Perumusan Peraturan Daerah**

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah melibatkan eksekutif dan legislatif secara bersama-sama dalam membahas dan menetapkan peraturan daerah serta bersama membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah. Hal ini merupakan hubungan kerja sama antara dua lembaga negara tersebut yang mempunyai kedudukan setara dan bersifat kemitraan dalam sistem pemerintah daerah. Itulah sebabnya dalam pelaksanaan fungsi-fungsi, keduanya secara bersama-sama membuat peraturan daerah termasuk pembuatan kebijakan.

## **Perencanaan**

Suandy mengemukakan bahwa secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program), dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh.

Perencanaan yang dilakukan terkait Sistem Pengendalian Banjir Yaitu Melalui :

### **a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)**

Musyawarah perencanaan pembangunan yang sering kita kenal dengan sebutan musrenbang, adalah sarana pemerintah disemua tingkat, untuk menghimpun aspirasi pembangunan disemua bidang kehidupan masyarakat. Disisi lain musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) merupakan cermin dari praktik partisipasi warga dan sekaligus arena akuntabilitas pemerintah, baik dari jajaran pimpinan daerah, kalangan masyarakat dari berbagai komponen, dan kalangan usaha/bisnis, dapat bertemu dan berdialog mengenai program daerahnya dengan tujuan musrenbang sebagai penyempurna dari rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

### **b. Kanal Banjir**

#### **1) Perbaikan Drainase**

Perbaikan drainase penting untuk dilakukan mengingat, drainase ini merupakan penyebab faktor utama terjadinya banjir. Jika drainase tidak dilakukan perbaikan terhadap drainase-drainase yang rusak atau bahkan jebol akibat debit air yang tinggi saat terjadinya hujan deras tersebut atau karena memang drainase yang sudah tidak terawat kemudian rusak akibat sudah tua sehingga perlu untuk diperbaiki. Akibat rusaknya drainase tersebut sehingga air yang mengalir tidak terarah yang mengakibatkan air meluap ke jalan-jalan atau bahkan merendam ke perumahan-perumahan yang ada disekitarnya.

#### **2) Normalisasi Sungai**

Sungai merupakan saluran aliran air yang mengalir secara alami dari daerah yang tinggi ke daerah yang lebih rendah dan memanjang menuju laut. Jenis sungai terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sungai hulu dan sungai hilir, Sungai Hulu

yaitu daerah tempat aliran sungai berawal dan Sungai Hilir yaitu daerah tempat aliran sungai berakhir. Fungsi sungai memiliki peranan yang sangat penting karena melancarkan jalannya aliran-aliran air sampai pada laut, termasuk penyebab utama terjadinya banjir jika sungai-sungai yang ada terjadi masalah. Maka dari itu sungai perlu untuk dilakukan normalisasi sungai untuk mencegah terjadinya banjir. Normalisasi sungai dilakukan melalui:

Pertama, pembersihan sungai. Penyebab utama terjadinya banjir pada permukiman masyarakat yang ada di sekitar sungai merupakan akibat pembuangan sampah ke sungai yang berakibat sampah menumpuk dan menyumbat aliran sungai. ketika terjadinya hujan deras kemudian debit air meningkat, banjir pun terjadi, akibatnya aliran sungai tersumbat dan air sungai meluap ke kepermukiman warga. Maka dari itu perlu dilakukan pembersihan sungai akibat sampah-sampah yang ada sehingga tidak ada lagi menyumbat aliran-aliran sungai yang menjadi penyebab terjadinya banjir.

Kedua, perbaikan tanggul sungai. Tanggul merupakan bangunan pengatur sungai yang bisa di manfaatkan untuk pengendali banjir. Tanggul disepanjang sungai adalah salah satu bangunan yang paling utama dan paling penting dalam usaha melindungi kehidupan dan harta benda masyarakat terhadap genangan-genangan yang disebabkan banjir dan gelombang pasang. Perbaikan tanggul sangat perlu dilakukan mengingat fungsi tanggul untuk mencegah aliran air keluar dari alur dan bantaran sungai serta meminimalisir dampak banjir (mitigasi bencana banjir).

## **B. Faktor-faktor Penghambat dan Solusinya dalam Implementasi Sistem Pengendalian Banjir**

### **1. Faktor Penghambat**

Faktor adalah keadaan atau peristiwa yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Berdasarkan hasil wawancara maka faktor-faktor penghambat dalam mengimplementasikan peraturan daerah RTRW Kota Bandar Lampung adalah;

#### **a. Keterbatasan Anggaran**

Menurut Suparmoko, anggaran adalah suatu daftar atau pernyataan terperinci tentang pendapatan dan belanja negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Anggaran mempunyai kedudukan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Anggaran menjadi faktor paling utama yang menghambat proses implementasi kebijakan terkait sistem pengendalian banjir, tanpa adanya anggaran

yang memadai maka kualitas sarana prasarana yang diberikan juga tidak maksimal. Seperti, pembangunan drainase dengan jarak yang lebih pendek dari perencanaan dan pembangunan drainase yang tidak sesuai dengan standar, akibatnya cepat mengalami kerusakan pada drainase-drainase yang baru dibangun. Maka sistem pengendalian banjir tersebut menjadi tidak maksimal akibat terbatasnya anggaran yang diberikan.

**b. Minimnya Kesadaran Masyarakat**

Kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sangat familiar untuk saat ini, kebanyakan dari mereka hanya berfikir secara parsial dan hanya ingin menguntungkan diri sendiri, seperti masalah pembuangan sampah di sungai terutama masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, pembuangan limbah industri, pencemaran air dll. Sekarang ini banyak sekali masalah yang terjadi akibat kerusakan lingkungan yang tidak terkendali pada lingkungan hidup. Pertumbuhan penduduk merupakan penyebab banyak terjadinya kerusakan lingkungan. Semua aktivitas yang dilakukan manusia pada akhirnya akan memberikan dampak negatif pada lingkungan, salah satunya masalah lingkungan yang akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan adalah masalah sampah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang SITAS ISLA Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kecamatan Sukarame, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kota Bandar Lampung kecamatan Sukarame bahwa Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir dapat dikatakan kurang baik. Akan tetapi masih ada drainase yang belum berfungsi secara menyeluruh, terutama pada kawasan-kawasan rendah dan cekung. Untuk menanggulangi genangan air hujan tersebut diperlukan perencanaan sistem drainase yang berwawasan lingkungan: Drainase berwawasan lingkungan adalah prasarana berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air, dimana pembangunannya terintegrasi dengan Rencana Umum Tata Ruang.
2. Hambatan dalam Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir di Kecamatan Sukarame adalah sumber daya finansial kurang memadai, banyaknya bangunan liar dan kurangnya keterlibatan masyarakat.

## B. Saran

1. Pentingnya sosialisasi keseluruh wilayah bandar lampung khususnya kecamatan Sukarame, terutarna tentang pentingnya buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan saluran drainase, dan pentingnya adanya saluran drainase. Solusi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran Sosialisasi ini dimaksudkan masyarakat untuk menjaga lingkungan.

2. Dilakukan pemeliharaan secara berkala pada saluran drainase yang ada. Pemeliharaan drainase sudah dilakukan dengan mempertimbangkan curah hujan yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Koordinasi dan kewenangan dengan pihak-pihak yang terkait harus berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya, hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan dan permasalahan drainase di Kecamatan Sukarame dapat teratasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL

- Agustri, M. P., & Asbi, A. M. (2020). Tingkat Risiko Bencana Banjir di Kota Bandar Lampung dan Upaya Pengurangannya Berbasis Penataan Ruang. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 11(1), 23-38.
- Andriyanto, D. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Pasal 31 Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Dirwansyah, S. (2014). Analisis Kerugian Akibat Banjir di Bandar Lampung. *Jurnal Teknik Sipil UBL*, 5(1).
- Ghifari, A. R. (2021). *Pengelolaan Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Dalam Menangani Banjir Di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Irawan, R. (2016). Program Dinas Pekerjaan Umum Dalam Penanggulangan Banjir Di Daerah Antasari Di Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*, 4(1), 2101-2113.
- Nyaman, S., & Maju, D. M. 3.4. 3 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung. *AHLI MADYA (A. Md) Pada Program Studi Diploma Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung*, 15.
- Peran, D. P. U. (2018). *PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TERHADAP PENGENDALIAN BANJIR DI SAMARINDA*.
- Ramadhanni, R. F., Setiyono, B., & Manar, D. G. (2015). Implementasi program penanganan banjir Rob di wilayah pesisir kota pekalongan. *Journal of Politic and Government Studies*, 5(4), 261-270.
- Siswanto, S. (2021). STUDI KASUS SISTEM DRAINASE YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG. *REKAYASA: Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik Universitas Lampung*, 25(1), 22-26.-

Sonia, N., & Fithriyyah, M. U. (2023). Strategi Penanggulangan Banjir Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Di Kota Pekanbaru: Dalam Tinjauan Analisis SWOT. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, 5(2), 93-99.

Wulandari, K. (2022). Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pengendalian Banjir Di Kota Surakarta. *Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(1).

## BUKU

Arsyad M. (2017). Modul Manajemen Penanggulangan Bencana Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir. Bandung: Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi.

Asmorowati, E. T., Rahmawati, A., Sarasanty, D., Kurniawan, A. A., Rudiyanto, M. A., Nadya, E., & Nugroho, M. W. (2021). *Drainase Perkotaan*. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2022). *Kecamatan Sukarame Dalam Angka 2022*. <https://bandarlampungkota.bps.go.id/publication/2022/09/26/f063b7c2fb81b12451260049/kecamatan-sukarame-dalam-angka-2022.html>

C Asdak. (2014). Hidrologi Dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Hardi, W., & R Ahmad, B. (2019). Kolaborasi Penanganan Bencana.

Mustari, N., & IP, S. (2015). KEBIJAKAN PUBLIK. Yogyakarta: Leutikaprio.

Nugroho, M. W. (2021). DRAINASE PERKOTAAN.

Robi Amri Mohd. (2016). RBI (Resiko Bencana Indonesia). Jakarta: BNPB.

Silalahi, B., & Harahap, M. E. (2021). *Penyebab Potensi Banjir di Daerah Aliran Sungai Deli Kota Medan*. Penerbit Adab.

Syarifudin, A. (2017). *Drainase Perkotaan Berwawasan Lingkungan*. Penerbit Andi.